

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan pembangunan pada sektor ekonomi di Indonesia tentu adanya kontribusi dari seluruh usaha yang ada, dari usaha berskala besar hingga kecil, salah satunya yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini amat berperan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (UKM RI) 2022, mengungkapkan bahwa UMKM telah memberikan sumbangsih pada Produk Domestik Bruto (PDB) sejumlah 60,5% serta 96,9% terjadi penyerapan tenaga kerja dari jumlah keseluruhan penyerapan tenaga kerja nasional. Hal itu mengungkapkan, UMKM punya kontribusi yang amat besar dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Mengacu Kementerian Koperasi dan UKM RI, total UMKM di Indonesia tersu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bersumber dari data Kementerian Koperasi, dan UKM RI, total UMKM di Indonesia per tahun 2022 yaitu 20,76 juta unit. Dimana jumlah UMKM mengalami peningkatan 26,6% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 16,4 juta unit. Namun, melansir ukmindonesia.id, total UMKM di Indonesia belum mencerminkan seluruh total seluruh UMKM yang sesungguhnya. Hal itu disebabkan karena masih ada UMKM yang tidak mendaftarkan usahanya ke dinas sehingga sulit untuk didata.

Mengingat peran UMKM yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia, perlu dilakukannya pendataan jumlah dan perkembangan UMKM setiap daerah di Indonesia. Berikut di bawah merupakan tabel perkembangan UMKM di Provinsi Bali yang bersumber dari Dinas Koperasi, UKM di tiap-tiap Kabupaten/Kota.

Tabel 1. 1
Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Badung	19.688	19.261	22.647	40.989	21.699
Kabupaten Bangli	44.068	44.068	44.123	44.175	44.251
Kabupaten Buleleng	34.552	34.374	54.489	57.216	66.368
Kabupaten Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620	75.666
Kabupaten Jembrana	27.654	24.346	46.277	66.537	67.183
Kabupaten Karangasem	39.589	40.468	57.456	40.614	50.717
Kabupaten Klungkung	11.761	14.584	35.792	26.072	35.792
Kabupaten Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160	47.957
Kota Denpasar	31.826	32.026	32.224	32.226	29.749
TOTAL	326.009	327.353	412.265	430.609	439.382

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali (Data diolah penulis, 2023)

Mengacu tabel 1.1, diketahui bahwa Kabupaten Buleleng memiliki perkembangan UMKM yang baik dari tahun 2018 ke tahun 2022. Sementara itu, jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng terus berubah dan cenderung terjadi kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 menuju 2020, total UMKM meningkat drastis dengan perkembangan sebesar 20.115. Pada tahun 2022 mengalami penambahan usaha sebanyak 9.152 dibandingkan tahun sebelumnya. Data UMKM dapat menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi di suatu wilayah. Apabila jumlah UMKM di suatu daerah terus mengalami penambahan, maka keadaan ekonomi di wilayah tersebut dapat dikatakan baik. Begitu sebaliknya, ketika jumlah UMKM mengalami penurunan, berarti keadaan ekonomi di suatu wilayah sedang melemah.

Bersumber pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinperinkopukm) Kabupaten Buleleng tahun 2022, diketahui persentase banyaknya pelaku usaha di sektor perdagangannya sebesar 49%, sektor Perindustrian sebesar 26%, sektor jasa sebesar 15%, dan terakhir 10% untuk sektor pertanian dan non pertanian. Data itu menjadikan sektor perdagangan merupakan usaha yang paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Hal ini berarti usaha pada sektor perdagangan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi di suatu daerah. Pelaku UMKM pada sektor perdagangan paling banyak ada di Kecamatan Buleleng sebesar 1.196 unit, disusul dengan Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Sukasada sebesar 300an jumlah UMKM. Untuk lebih lengkap, bisa disimak pada tabel 1.2 terkait total UMKM pada Sektor Perdagangan di Kabupaten Buleleng secara formil.

Tabel 1. 2
Data UMKM Pada Sektor Perdagangan (Formil) Tahun 2022

Jumlah UMKM	Nama Kecamatan
1196	Kecamatan Buleleng
372	Kecamatan Gerokgak
317	Kecamatan Sukasada
192	Kecamatan Seririt
191	Kecamatan Sawan
166	Kecamatan Banjar
158	Kecamatan Kubutambahan
105	Kecamatan Tejakula
88	Kecamatan Busung Biu

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (Data diolah penulis, 2023)

Kemajuan UMKM suatu daerah dapat diukur dari keuangan yang sehat. Kondisi keuangan yang sehat bisa dilihat dari hasil pencatatan laporan keuangannya yang baik. Oleh sebab itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah

meluncurkan standar yang ditujukan guna memudahkan UMKM dalam pencatatan keuangannya yang bernama Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM ini sudah dikeluarkan sejak tanggal 24 Oktober 2016 serta mulai diimplementasikan per 1 Januari 2018. Penyusunan menggunakan SAK EMKM punya misi guna memberikan kemudahan para pelaku usaha karena pencatatannya yang lebih sederhana dan sesuai kebutuhan UMKM (Pertama dan Sutapa, 2020).

Fenomena yang terjadi yaitu pelaku usaha sudah ada mengimplementasikan SAK EMKM, namun terdapat banyak pelaku usaha yang belum mengimplementasikan SAK EMKM di berbagai wilayah (Manehat dan Sanda, 2022). Alasan penulis memilih lokasi di kecamatan Buleleng karena daerah ini menjadi penyumbang jumlah UMKM paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Melihat potensi yang dimiliki UMKM Buleleng, Pejabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menargetkan bahwa Buleleng bisa menjadi Kabupaten UMKM dalam beberapa tahun kedepan. Pejabat Bupati Buleleng juga mengatakan jika seluruh UMKM bergerak semua, maka Buleleng bisa menjadi kabupaten UMKM (melansir dari *infopublik.id*). Melihat hal tersebut, maka setiap daerah harus memperhatikan dan mengupayakan UMKM terus tetap bertahan dan makin berkembang. Apalagi UMKM di kecamatan Buleleng memiliki potensi dan kontribusi yang besar untuk mewujudkan target tersebut melihat potensi yang ada, salah satunya dengan melakukan pelaporan keuangannya sesuai dengan SAK EMKM.

Berdasarkan survei awal melalui wawancara umum kepada beberapa pelaku UMKM yang terdapat di Kecamatan Buleleng, ternyata ditemukan bahwa terdapat banyak pelaku UMKM yang belum membuat laporan keuangan berdasar standar yang berlaku. Pelaku UMKM sudah banyak melaksanakan pencatatan sederhana. Namun masih ada pelaku UMKM yang tidak melaksanakan pencatatan laporan keuangan sama sekali. Hal ini disebabkan, pelaku UMKM merasa hal tersebut hanya mmebuang waktu mereka, kesulitan melaksanakan pencatatan keuangan, serta merasa tidak terlalu penting untuk melakukan penyusunan laporan keuangan selaras dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM.

Laporan Keuangan yang selaras dengan SAK UMKM bisa berfungsi untuk mengetahui penilaian kondisi keuangan, keberlanjutan suatu usaha serta dasar pengambilan keputusan. Dengan membuat laporan keuangan bisa melihat perputaran dan kondisi keuangan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang telah selaras dengan standar berlaku tentunya lebih mudah menarik investor dan kreditor dalam memberikan pembiayaan atau investasi. Dimana laporan keuangan menjadi salah satu syarat dalam mengajukan pembiayaan. Sulitnya pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari pihak kreditor karena laporan keuangan yang dibuat belum baik serta tidak selaras dengan standar yang berlaku (Rahmawati & Puspasari, 2017).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SAK EMKM yang pertama yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan adalah suatu kemampuan dan keterampilan didalam memahami konsep keuangan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Pemahaman terkait literasi keuangan menjadi salah satu pondasi yang harus ditingkatkan dalam lingkungan yang terus berubah. Mengacu hasil

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022 bahwa besar tingkat literasi keuangan di Indonesia sejumlah 49,68% Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia masih memiliki tantangan yang besar, melihat indeks literasi keuangan masih dibawah 50% padahal jumlah penduduk Indonesia melebihi 270 juta orang. Angka literasi keuangan di Indonesia yang sekarang baru 49,68% masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju sehingga perlu ditingkatkan.

Masih rendahnya literasi keuangan pada masyarakat juga dapat dilihat ketika mewawancarai beberapa pelaku usaha di kecamatan Buleleng. Mereka mengatakan bahwa tidak melakukan pencatatan penghasilan secara rinci, dan tidak memisahkan penghasilan usaha dengan uang pribadi. Hal itu merupakan dampak dari rendahnya suatu literasi keuangan. Literasi keuangan yang tinggi, maka pemahaman terhadap konsep keuangan juga kian baik. Pelaku UMKM yang punya literasi keuangan maka memiliki niat dan sadar guna membuat laporan keuangan sejalan dengan SAK EMKM (Oktaviranti dan Alamsyah, 2023). Selaras dengan pengujian yang dilaksanakan oleh Nurjanah dan Wibisono (2023) mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif pada penggunaan SAK EMKM.

Faktor selanjutnya yaitu persepsi pelaku UMKM. Persepsi pelaku UMKM berarti bagaimana pandangan pelaku UMKM dalam memandang suatu kejadian (Kusuma dan Lutfiany, 2018). Persepsi berarti gambaran atau tanggapan yang dimiliki yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi pelaku UMKM disini berarti pandangan pelaku UMKM terhadap suatu informasi Persepsi pada pengujian ini difokuskan terkait persepsi kemudahan dan persepsi

kebermanfaatan. Fenomena yang masih terjadi yaitu pelaku UMKM merasa kesusahan harus membuat laporan keuangan dan kegiatan tersebut hanya membuang waktu saja serta menganggap hal itu tidak terlalu penting jika diterapkan. Maka dari itu, perlu adanya perubahan dari persepsi pelaku UMKM itu sendiri terkait pentingnya pelaporan keuangan selaras SAK EMKM. Dengan punya sudut pandang yang baik pada suatu objek maka persepsi itu berpengaruh terhadap proses penerimaan dalam hal ini pengimplementasian SAK EMKM. Selaras dengan pengujian yang dilaksanakan oleh Susilowati et al. (2021) bahwa persepsi pelaku UMKM punya peran yang positif serta substansial pada penerapan SAK EMKM. Namun, bertolak belakang dengan penelitian Rismawandi et al. (2022) bahwa persepsi pelaku UMKM tak berperan sama sekali pada implementasi SAK EMKM.

Faktor ketiga yaitu umur usaha. Umur usaha merupakan lamanya usaha telah menjalankan operasionalnya. Umur usaha adalah waktu yang dihitung selama menjalankan kegiatan usaha dari awal berdiri hingga sekarang masih menjalankan usahanya. Fenomena yang terjadi yaitu usaha yang tergolong masih muda lebih memfokuskan untuk mengembangkan usahanya dibandingkan dengan mencatat pelaporan keuangannya. Usaha yang sudah lama berdiri membuat pemilik usaha melakukan pengelolaan usahanya yang lebih baik dan mengikuti zaman yaitu membuat laporan keuangan selaras dengan standar yang berlaku. Hal ini selaras dengan pengujian Rejeki & Kautsar (2020) bahwa umur usaha punya peran yang positif serta substansial pada pembuatan laporan keuangan selaras SAK EMKM. Namun, tidak selaras dengan pengujian Wulandari & Arza (2022) bahwa umur usaha tak berperan substansial pada implementasi SAK EMKM.

Pengujian ini adalah pengembangan dari pengujian yang sudah dilaksanakan oleh Puspitaningrum (2021) dengan judul “Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM, Tingkat Pendidikan, dan Umur Usaha Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Kasus pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini mengembangkan variabel yang berbeda yaitu variabel literasi keuangan. Dimana variabel Literasi Keuangan memiliki hubungan dengan implementasi SAK EMKM karena dengan mempunyai literasi keuangan yang tinggi akan lebih mudah memahami serta mengimplementasikan SAK EMKM dengan baik. Selain itu, peneliti menggunakan sektor yang berbeda yaitu sektor Perdagangan. Dimana sektor ini pada UMKM di Kecamatan Buleleng menjadi sektor yang paling banyak dipilih dalam menjalani usaha dibandingkan dengan sektor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena yang ada, serta ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya pada variabel literasi keuangan, persepsi pelaku UMKM, serta umur usaha. Maka dari itu peneliti ingin melaksanakan pengujian kembali terkait variabel tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Pelaku UMKM dan Umur Usaha Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kecamatan Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, dapat disimpulkan masalah yang muncul yaitu:

1. Pelaku UMKM masih ada yang tidak mendaftarkan usahanya, sehingga sulit untuk mendata dan mengetahui jumlah UMKM di Indonesia yang sesungguhnya.
2. Pelaku UMKM masih banyak yang belum melaksanakan pembuatan laporan keuangan berdasar SAK EMKM.
3. Masih rendahnya literasi keuangan pada pelaku UMKM yang berdampak pada pencatatan keuangan usaha.
4. Pelaku UMKM merasa membuat laporan keuangan hanya menghabiskan waktu mereka, kesulitan dalam melakukan pencatatan, juga merasa tidak begitu penting guna melakukan penyusunan laporan keuangan selaras dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM.
5. Umur usaha tergolong masih muda lebih memfokuskan untuk mengembangkan usahanya dibandingkan dengan mencatat pelaporan keuangannya usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada pengujian ini, penulis membatasi permasalahan yang diteliti supaya lebih terarah dan terhindar dari penafsiran yang berbeda. Penulis memfokuskan pada pengumpulan data dan hasil observasi untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, persepsi pelaku UMKM, serta umur usaha pada implementasi SAK

EMKM. Dengan studi kasus pada UMKM Sektor Perdagangan di Kecamatan Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan yang menjadi pokok permasalahan pada pengujian ini, yakni:

1. Apakah literasi keuangan berperan pada implementasi SAK EMKM di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah persepsi pelaku UMKM berperan pada implementasi SAK EMKM di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah umur usaha berperan pada implementasi SAK EMKM di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari pengujian mengacu pada rumusan masalah di atas, yakni:

1. Untuk menganalisis peran literasi keuangan pada implementasi SAK EMKM di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk menganalisis peran persepsi pelaku UMKM pada implementasi SAK EMKM di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk menganalisis peran umur usaha pada implementasi SAK EMKM di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengujian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan terkait implementasi SAK. Selain itu, hasil pengujian ini diharapkan penulis memberikan referensi bagi pengujian berikutnya terkait implementasi SAK EMKM dan digunakan untuk dapat memperkuat serta mendukung pengujian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pengujian ini bermanfaat bagi penulis guna mengasah kemampuan dan wawasan terkait permasalahan di sekitar, serta dijadikan sebagai latihan dari penerapan ilmu yang telah didapat pada bangku perkuliahan tentang akuntansi. Selain itu juga mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait SAK EMKM yang belum lengkap dipelajari sebelumnya.

b. Bagi UMKM

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai gambaran terkait pentingnya laporan keuangan selaras dengan standar yang berlaku bagi keberlangsungan usaha serta sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, diharapkan seluruh UMKM bisa mengimplementasikan SAK EMKM pada proses pembuatan laporan keuangan demi kualitas laporan yang lebih baik.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Pengujian ini bisa dijadikan sumber referensi juga tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha terkait implementasi SAK EMKM. Selain itu pengujian ini bisa memberikan sumbangan terkait pengembangan teori terkait pengaruh literasi keuangan, persepsi pelaku UMKM, serta umur usaha pada implementasi SAK EMKM.

